

Ancaman *Deepfake*: Potensi Degradasi Identitas Nasional Indonesia

Natasha Priadi^{*1}, Marten Hanura², Muhammad Faiq Adi Pratomo³

^{1,2} Departemen Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro, Indonesia

Article Info

Article History

Received: 07 July 2025;

Revised: 09 December 2025;

Accepted: 10 January 2026;

Published: 18 June 2026.

How to cite:

Priadi, N., Hanura, M., & Pratomo, M. F. A. (2025). Peran Greenpeace dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tahun 2022–2023. *Journal of International Relations Diponegoro*, 11(1), 52–70. <https://doi.org/10.14710/jirud.v11i1.52975>.

*Email: priadinatasha@gmail.com

Abstract

This research aims to look at the potential threat of deepfakes to the political and democratic processes that can degrade Indonesia's national identity as a democratic country. This research uses a mix method with descriptive analysis to describe the threat deepfake poses to Indonesia's political and democratic sustainability. This research analyzes the constructivism framework and the concept of wild dividend to show the threats and after-effects of deepfake abuse, especially the potential degradation of Indonesia's national identity. Based on the results of the analysis, this research found various vulnerabilities that exist in the democratic process in Indonesia that could be exacerbated by deepfake abuse. These vulnerabilities are then analyzed to show the various potential threats affected by deepfake abuse. From the various potential threats that have been described, this research identifies the further effects of the presence of deepfakes by looking at the potential for democratic backsliding and wild dividend phenomena that can occur in Indonesia in the long run.

Keyword: deepfake, identity, threat, democracy, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi ancaman *deepfake* terhadap proses politik dan demokrasi yang dapat mendegradasi identitas nasional Indonesia sebagai negara demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode mix method dengan descriptive analysis untuk menguraikan ancaman bahaya *deepfake* terhadap keberlangsungan politik dan demokrasi Indonesia. Analisis penelitian ini menggunakan kerangka konstruktivisme dan konsep *Liar's Dividend* untuk menunjukkan ancaman maupun efek lanjutan dari penyalahgunaan *deepfake*, terkhususnya potensi degradasi identitas nasional Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan berbagai kerentanan yang ada dalam proses demokrasi di Indonesia yang dapat diperburuk dengan penyalahgunaan *deepfake*. Kerentanan ini kemudian dianalisis untuk menunjukkan berbagai potensi ancaman yang dipengaruhi oleh penyalahgunaan *deepfake*. Dari berbagai potensi ancaman yang telah dipaparkan, penelitian ini mengidentifikasi efek lanjut dari hadirnya *deepfake* dengan melihat potensi terjadinya fenomena democratic backsliding dan *Liar's Dividend* yang dapat terjadi di Indonesia pada jangka panjang.

Kata Kunci: *deepfake*, identitas, ancaman, demokrasi, Indonesia.

Copyright © 2026 by Author(s).

Published by Universitas Diponegoro

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License (CC BY-SA 4.0).



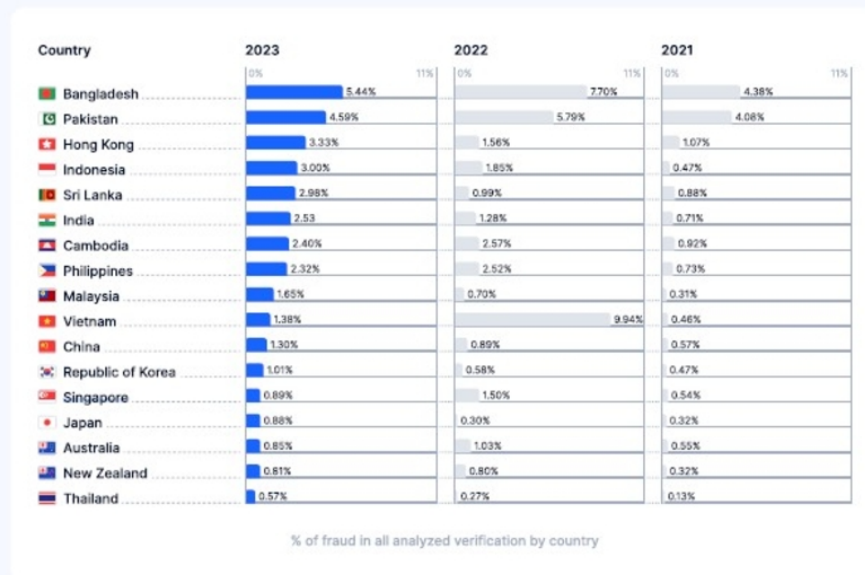
PENGANTAR

Deepfake adalah konten digital palsu atau manipulasi terhadap konten autentik berupa video, gambar, audio, maupun teks dari berbagai sumber menggunakan teknik deep learning (Gambín et al., 2024). *Deepfake* dibuat menggunakan metode Deep Neural Networks (DNN) yang membuat kode instan melalui teknik pertukaran wajah. Melalui berbagai klip video, *deepfake* akan bekerja secara otomatis untuk mempelajari konten dari berbagai sudut dan kondisi lingkungan yang ada. Hasil konten akan ditingkatkan lebih baik melalui teknologi Generative Adversarial Networks (GAN) yang dapat mendeteksi sekaligus mengoreksi kekurangan dari *deepfake* yang telah dibuat (Hendrawan et al., 2023). Umumnya, *deepfake* bersifat netral dan digunakan untuk berbagai hal karena mampu menciptakan avatar atau virtual assistance dalam meningkatkan kualitas pengalaman konferensi video (Gambín et al., 2024). Sekalipun netral, nyatanya banyak pengguna menyalahgunakan *deepfake* untuk kepentingan tertentu.

Pada konteks hubungan internasional, penyalahgunaan *deepfake* dapat dikategorikan sebagai bentuk cyber deviance atau penyimpangan siber karena merusak tatanan normatif serta mengancam keamanan global (Graham & Smith, 2024). Secara singkat, cyber deviance merupakan konsep yang menjelaskan tindakan atau perilaku penyimpangan siber yang melanggar norma. Dalam artian, *deepfake* dapat dimanfaatkan oleh setiap aktor negara maupun non-negara untuk menyebarkan disinformasi pada ranah hukum maupun politik (Khapra, 2022). Perkembangan teknologi ini menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh semua aktor, utamanya ketika sudah mengancam keamanan nasional sekaligus mengacaukan implementasi hukum, ekonomi, dan tatanan masyarakat (Sumsu, 2024).

Kasus penyalahgunaan *deepfake* pada skala global mengalami peningkatan sebesar sepuluh kali lipat dari tahun 2022 hingga 2023 di berbagai industri. Peningkatan kasus ini dalam persentase sebanyak 1.740% di wilayah Amerika Utara, 1.530% di wilayah APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation), 780% di wilayah Eropa, 450% di wilayah MEA, dan 410% di wilayah Amerika Latin (Sumsu, 2023). Berdasarkan laporan terkait, ada lima industri yang paling terdampak dengan hadirnya tren *deepfake*, yakni media daring, layanan profesional, medis, transportasi, dan video gaming. Kasus penyalahgunaan *deepfake* juga dilaporkan sebagai tren penipuan yang paling banyak dilakukan karena mudahnya akses teknologi untuk memanipulasi audio, foto, maupun video yang realistis. Berikut ini adalah laporan mengenai peningkatan kasus *deepfake* di wilayah APAC dari tahun 2021-2023.

Gambar 1. Data Pemalsuan Identitas di Wilayah APAC
Identity fraud rates in APAC, 2021–2023



Sumber: Das, 2023

Bahaya *deepfake* turut berdampak secara signifikan terhadap keberlangsungan proses demokrasi suatu negara, seperti pada kasus terbaru pemilu Amerika Serikat di tahun 2024. Elon Musk, salah satu pebisnis sukses di Amerika, menyebarkan video kampanye *deepfake* Kamala Harris, salah satu kandidat presiden, yang berisikan narasi palsu menggunakan suaranya. Video aslinya berupa kampanye milik Kamala namun narasi suara dalam video tersebut telah diubah menyerupai suaranya (Bensinger, 2024). Tidak hanya itu, adapun foto *deepfake* menyerupai Trump, salah satu kandidat presiden lainnya, sedang ditangkap oleh polisi dan dinarasikan dalam berita penangkapan terhadap dirinya. Dalam merespons kasus ini, pemerintah California merencanakan pemberlakuan hukum yang melarang tindakan penyalahgunaan AI tersebut dikarenakan 18 negara bagian Amerika Serikat sudah memiliki regulasi *deepfake* terhadap pemilu (Tenbarga, 2024). Dari kasus ini, masyarakat AS memiliki reaksi yang beragam antara khawatir dan mengkritik konten *deepfake* namun juga berhasil mengecoh setiap pemilih potensial yang akan memberikan suaranya pada pemilu tersebut.

Tidak hanya itu, Indonesia juga menghadapi permasalahan yang sama. Adanya kebebasan berpendapat sebagai salah satu prinsip demokrasi yang dipegang Indonesia menjadi bentuk kerentanan, utamanya dalam menyaring informasi yang layak dan akurat apalagi dengan munculnya *deepfake*. Manipulasi konten digital seperti ini berpotensi mempengaruhi persepsi publik sehingga menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan. *Deepfake* juga menjadi media yang tepat untuk melakukan kampanye hitam yang bertujuan merusak keadilan pada masa pemilu, mengancam institusi demokrasi Indonesia, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu (Vaccari & Chadwick, 2020; Chesney & Citron, 2019). Padahal partisipasi politik menjadi hal yang penting bagi masyarakat demokratis di Indonesia. Penyebaran disinformasi melalui manipulasi *deepfake* ini tidak hanya mendistorsi diskursus politik, tetapi jugaelenyapkan kepercayaan masyarakat terhadap berlangsungnya proses demokrasi (Chesney & Citron, 2019).

Dampak lanjut dari penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia adalah potensi terjadinya degradasi terhadap identitas Indonesia sebagai negara demokrasi. Selama ini, Indonesia selalu mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi sejak bertransisi dari rezim otoritarian pada tahun 1998, seperti transparansi, pemilu yang adil, dan diskursus terbuka. Akan tetapi, penyalahgunaan *deepfake* mengancam rusaknya fondasi prinsip demokrasi tersebut melalui penyebaran disinformasi yang menyebabkan adanya distorsi politik untuk menurunkan kepercayaan masyarakat, baik terhadap figur maupun kandidat politik yang ada. Identitas negara dan prinsip-prinsip demokrasinya ini melalui sudut pandang konstruktivis, dibentuk secara sosial dan dipengaruhi oleh interaksi antaraktor domestik maupun internasional (Wendt, 1999). Apabila masyarakat tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap pemerintah akibat terpapar oleh konten manipulasi *deepfake* secara terus-menerus, proses demokrasi yang seharusnya berjalan justru terhambat dan melemahkan identitas Indonesia sebagai negara demokrasi karena tidak adanya lagi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

Di Indonesia, regulasi untuk penanganan kasus *deepfake* belum ada. Konsep kejahatan siber tersebut belum didefinisikan secara jelas di dalam hukum Indonesia (Hafiz, 2024). Salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk menangani kasus *deepfake* di Indonesia adalah Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Dalam melakukan penanganan sementara, Kominfo telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan pada 19 Desember 2023 yang turut menjadi pedoman bagi setiap pelaku usaha dan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik dan Privat meskipun tidak mengikat secara hukum (Riyanto & Nistanto, 2023). Adapun beberapa regulasi acuan yang menjadi pedoman bagi Kominfo dalam menindak kasus kejahatan siber utamanya terkait penyalahgunaan AI, yakni UU Nomor 11 tentang ITE dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana siber serta menjelaskan kekhususan dalam tindakan penyidikan kejahatan siber, yakni Kominfo sebagai salah satu pihak berwenang (Sitompul, 2018).

Nyatanya, tindakan yang dilakukan oleh Kominfo tersebut belum cukup untuk mengatasi sekaligus meminimalisir bahaya penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia. Masih ada kelemahan hukum yang membuat setiap pihak dapat menyebarkan disinformasi dan mendoktrin seseorang maupun sekelompok orang untuk mempercayai konten disinformasi. Berangkat dari pemaparan permasalahan yang ada, penelitian ini akan melihat potensi ancaman politik dan demokrasi terhadap Indonesia akibat adanya aksi penyalahgunaan *deepfake* utamanya dalam isu pemilu.

Melalui penelitian ini, penulis memberikan perspektif baru dalam menganalisis kasus *deepfake* di Indonesia menggunakan kerangka teori Hubungan Internasional, yakni konstruktivisme untuk melihat pengaruh *deepfake* terhadap identitas nasional dan bagaimana Indonesia merespons potensi ancaman tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai bahaya *deepfake* utamanya menyorot pada keberlangsungan politik dan proses demokrasi di Indonesia. Analisis mengenai efek dari *deepfake* ini akan melihat potensi terjadinya ancaman baru melalui suatu fenomena bernama *Liar's Dividend*.

TINJAUAN PUSTAKA

Konstruktivisme

Konstruktivisme dalam hubungan internasional dapat dipahami dengan konsep “world-making” yang menjelaskan bahwa fenomena internasional dikonstruksikan melalui praktik dan wacana sosial. Sebagian besar ilmuwan konstruktivis menggambarkan hubungan internasional sebagai anarkis. Dalam hal ini, anarki dipahami sebagai tidak adanya satu pihak yang secara khusus memegang kekuasaan sehingga pada dasarnya semua pihak terlibat dalam kekuasaan bersama sebagai konsekuensi yang tidak disengaja dari banyak tindakan mereka yang tidak terkoordinasi. Negara pada konteks ini menjalankan kemerdekaan mereka di bawah prinsip kedaulatan serta serangkaian aturan komitmen yang memberi mereka hak dan kewajiban satu sama lain. Kemandirian yang dimiliki oleh mereka menjadi batasan bagi negara lain dan setiap agen dari semua negara menerima konsekuensi yang tidak disengaja dari banyak pilihan individu mereka (Onuf, 2013).

Sebagai salah satu aktor utama dalam hubungan internasional, negara memperoleh identitas yang mereka miliki dengan memiliki pemahaman dan ekspektasi yang relatif stabil serta spesifik mengenai perannya. Sederhananya, identitas terkonstruksi secara sosial atau terbentuk dari budaya yang ada di lingkungan sekitarnya, bukan secara alamiah terbentuk. Pondasi dari identitas bersifat relasional, artinya setiap individu memiliki peran institusional, seperti sebagai saudara, anak, guru, dan warga negara. Sama halnya dengan negara yang dapat memiliki banyak identitas, seperti sebagai negara “berdaulat”, “pemimpin dunia yang bebas”, “kekaisaran”, dan lainnya. Identitas ini dapat mendefinisikan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara dengan memproses apa yang mereka lihat dalam mendefinisikan sebuah situasi. Bila identitas ini tidak ada atau dimiliki, maka akan sulit dalam mendefinisikan situasi maupun kepentingan sehingga tidak mampu bertindak atau melangkah ke depan (Barnett, 2020; Wendt, 1992). Jadi, identitas ini menentukan kepentingan dan kepentingan menentukan tindakan ataupun langkah yang akan diambil. Hubungan antara ketiga hal tersebut tidaklah bersifat linear melainkan siklus karena sikap ataupun tindakan yang diambil sebuah aktor menentukan identitasnya dalam sistem internasional (Rosyidin, 2022).

Dalam perspektif ini, argumen utama yang ditekankan oleh konstruktivisme ialah bahwa sistem internasional tidak hanya dibentuk oleh faktor material saja seperti kemampuan militer, melainkan oleh ide, norma, dan kepercayaan. Adanya kesamaan ide ataupun pengetahuan serta norma konstitutif membentuk identitas dan kepentingan sebuah negara (Barnett, 2020). Identitas ini tidaklah tetap melainkan bersifat dinamis berdasarkan interaksi yang berjalan bersama dengan negara lain (Wendt, 1999). Identitas dalam politik internasional dan domestik merupakan hal yang vital dalam memastikan tingkat prediktabilitas dan keteraturan minimal. Maksudnya, ada ekspektasi ataupun interpretasi yang bisa dipahami antarnegara dalam menjamin tingkah laku dari masing-masing negara melalui pemahaman terhadap persepsi yang telah dibangun antara satu sama lain. Oleh karena itu, identitas ini memiliki fungsi yang penting dalam menjelaskan siapa seorang aktor dan aktor lainnya dengan melihat kepentingan maupun preferensi yang dimiliki (Adler, 1997; Hopf, 1998).

Konsep identitas yang telah dipaparkan sebelumnya, disesuaikan dengan realitas dan kondisi yang terjadi di era moderen ini dengan menyorot pada pendekatan nasionalisme. Pada konteks ini, praktik nasionalis dijadikan sebagai unit analisis dalam memahami bagaimana suatu

identitas nasional muncul dan dibentuk dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya sebuah konflik maupun mobilisasi. Praktik-praktik ini dijalankan oleh kelompok mayoritas maupun minoritas dalam suatu negara terlepas dari struktur kelembagaan yang ada. Nasionalisme dapat menjadi sebuah mekanisme yang kuat untuk membenarkan sekaligus menguatkan struktur kekuasaan yang ada seperti rezim otoriter. Kehadiran rezim otoriter menjadi sebuah contoh untuk melihat bagaimana masyarakat merespons seruan identitas nasional dari mereka dalam mempertahankan legitimasi kekuasaannya (Goode & Stroup, 2015).

Berdasarkan pemaparan di atas, Indonesia sebagai subjek penelitian memiliki identitas sebagai negara demokrasi sesuai dengan deklarasi yang tertuang dalam UUD 1945. Identitas Indonesia bersama dengan prinsip demokrasi terbentuk dari proses-proses sosial maupun interaksi bersama aktor domestik maupun internasional. Hadirnya identitas tersebut menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan dengan adanya ancaman dari penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Dalam konteks ini, *deepfake* dapat mengubah persepsi internal Indonesia yang mendukung identitas demokrasi, termasuk legitimasi dan norma-norma sosial yang turut membentuk hal itu. Ketika narasi disinformasi ini tersebar, ada potensi perubahan terhadap identitas Indonesia sebagai akibat hilangnya rasa kepercayaan masyarakat melalui manipulasi *deepfake*. Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh figur politik otoriter untuk hadir dan menguatkan legitimasi kekuasaan yang mereka miliki melalui narasi-narasi palsu yang dibangun dari konten *deepfake*. Oleh karena itu, konstruktivisme menjadi pisau analisis yang tepat dalam meneliti permasalahan ini.

Liar's Dividend

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Bobby Chesney dan Danielle Citron pada tahun 2019 dalam artikelnya yang berjudul *Deepfakes and the New Disinformation War*. Konsep ini dijelaskan sebagai salah satu efek atau bahaya dari penyalahgunaan teknologi *deepfake* pada skala luas. Bahaya ini mendasar pada penggunaan teknologi *deepfake* yang bertujuan untuk membuat seseorang maupun sekelompok orang percaya bahwa hal-hal fiksi telah terjadi. Namun, tidak semua kebohongan dalam bentuk fiksi ini melibatkan klaim afirmatif bahwa sesuatu telah terjadi (tidak terjadi sama sekali). Justru ancaman yang lebih parah datang dalam bentuk penyangkalan (denial).

Itulah yang dinamakan *Liar's Dividend*, dividen ini adalah salah satu bentuk ancaman atau bahaya dari penyalahgunaan *deepfake*. Bahaya ini turut mencakup hadirnya tren skeptisme terhadap kebenaran. Hadirnya rasa ketidakpercayaan ini dipicu oleh banyaknya berita palsu yang menjadi pengganti yang berguna ketika dihadapkan dengan pernyataan faktual yang merusak. Melalui faktor ini, tidak sulit untuk melihat tren *deepfake* yang akan meluas di masa depan sehingga masyarakat mungkin sulit untuk membedakan fakta yang mereka lihat dan dengar sekalipun hal tersebut adalah sebuah fakta. Dalam hal ini, penyebaran *deepfake* mengancam hilangnya kepercayaan masyarakat yang dapat menurunkan fungsi demokrasi berjalan dengan baik di suatu negara.

Pada konteks penelitian ini, hadirnya teknologi *deepfake* di Indonesia menjadi sebuah polemik baru yang perlu diperhatikan. Mudah-mudahan penyebaran teknologi ini yang menyasar pada semua golongan menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh Indonesia apalagi dengan kondisi minimnya literasi digital masyarakat. Apabila potensi ancaman ataupun bahaya dari *deepfake* ini dibiarkan begitu saja, akan mengganggu proses demokrasi di Indonesia dengan mudahnya

penyebaran disinformasi terhadap hal yang faktual. Ini dilihat dari potensi hilangnya rasa kepercayaan masyarakat yang tidak lagi dapat membedakan suatu fakta maupun kebenaran palsu, yakni fenomena *Liar's Dividend*.

METODE RISET

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini ialah metode campuran (*mix method*) dengan desain convergent parallel design, yaitu pengumpulan dan analisis data kualitatif serta kuantitatif dilakukan secara paralel, kemudian hasil keduanya diintegrasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ancaman penyalahgunaan teknologi *deepfake* terhadap identitas nasional Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena isu *deepfake* tidak hanya memerlukan analisis terhadap fenomena, kebijakan, dan kasus-kasus empiris, tetapi juga memerlukan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap ancaman tersebut.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui survei daring terhadap 147 responden menggunakan kuesioner berbasis Google Forms yang disebarakan melalui media sosial Instagram. Instrumen penelitian terdiri atas pertanyaan demografis, pengalaman responden terhadap *deepfake*, serta sepuluh indikator persepsi mengenai dampak *deepfake* terhadap demokrasi dan identitas nasional yang diukur menggunakan skala Likert empat tingkat (1 = sangat tidak setuju sampai 4 = sangat setuju). Data survei dianalisis menggunakan statistik deskriptif, meliputi distribusi frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata untuk menggambarkan kecenderungan persepsi responden. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi individu yang berusia minimal 17 tahun, aktif menggunakan media sosial, serta memiliki paparan terhadap informasi digital sehingga dianggap mampu memberikan persepsi mengenai penggunaan teknologi *deepfake* dalam konteks politik dan demokrasi di Indonesia. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring melalui media sosial Instagram hingga diperoleh 147 responden. Adapun pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dokumen, yakni prosedur sistematis untuk melakukan *review* atau mengevaluasi dokumen dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*. Analisis ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber relevan yang dengan penelitian sekaligus mendukung argumen terkait. Dokumen-dokumen ini berupa artikel jurnal, artikel berita, buku, laporan yang perlu untuk dilihat dari segi kualitas yang dimiliki (Rahman, et al. 2022).

Data hasil survei dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata (*mean*). Persentase dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan

P= Persentase

f = frekuensi jawaban

N = Jumlah Responden (147)

Nilai rata-rata kemudian diinterpretasikan berdasarkan interval skala Likert empat tingkat untuk menggambarkan kecenderungan persepsi responden terhadap setiap indikator penelitian.

Nilai rata-rata (mean) diukur dengan menggunakan skala likert 1-4 dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum(f_i \times x_i)}{N}$$

Keterangan:

$\bar{X}$ = Nilai rata-rata

f_i = Frekuensi pada setiap kategori jawaban

x_i = Skor Likert (1–4)

N = Jumlah Responden

Analisis kualitatif dilakukan menggunakan analisis tematik dengan mengidentifikasi pola-pola ancaman *deepfake* dari berbagai studi kasus yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis menggunakan perspektif konstruktivisme Alexander Wendt untuk menjelaskan bagaimana manipulasi informasi melalui *deepfake* dapat memengaruhi konstruksi identitas nasional, serta menggunakan konsep liar's dividend untuk menjelaskan konsekuensi jangka panjang berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap informasi dan institusi demokrasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif, yakni pendekatan yang menjelaskan penelitian dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Tahap akhir penelitian dilakukan melalui integrasi (triangulasi) hasil analisis kualitatif dan kuantitatif. Temuan dari studi kasus dibandingkan dengan hasil survei persepsi masyarakat sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih utuh mengenai potensi ancaman *deepfake* terhadap demokrasi dan identitas nasional Indonesia. Dalam hal ini, penjelasan penelitian akan dimulai dalam mengkaji fenomena *deepfake* secara general sebelum dikontekstualisasikan pada kasus yang terjadi di Indonesia untuk dianalisis potensi ancaman yang dapat terjadi.

PEMBAHASAN

Dukungan Terhadap Otsus Papua Dari Akun-Akun Asing dengan Profil *Deepfake*

Kasus penyalahgunaan *deepfake* ini bermula dari munculnya berbagai akun palsu berbahasa asing yang mendukung kelanjutan otonomi khusus (otsus) Papua di media sosial. Akun-akun palsu ini hadir di tengah adanya desakan dari beberapa kelompok masyarakat di Papua yang menuntut evaluasi secara menyeluruh untuk kebijakan otsus yang telah berlangsung selama 20 tahun. Adapun akun-akun palsu ini menggunakan profil warga asing yang cukup realistis dan menggunakan bahasa Belanda, Jerman, Inggris, hingga Indonesia. Narasi yang disebarkan oleh akun-akun palsu ini mencakup pernyataan bahwa otsus akan menyejahterakan warga Papua di seluruh bidang, baik pertanian, kesehatan, maupun pendidikan. Identifikasi terhadap akun-akun palsu ini dilakukan oleh seorang peneliti dari Universitas Leiden yang mampu mengonfirmasi bahwa foto profil yang mereka gunakan menggunakan teknologi AI (Wijaya, 2020).

Adapun dampak dari hadirnya kampanye dari akun-akun palsu ini berhasil untuk menenggelamkan suara-suara orang yang mendukung kemerdekaan Papua Barat. Hadirnya kasus ini menjadi sebuah serangan terhadap proses konstruksi identitas Indonesia yang mana Papua menjadi salah satu wilayah yang sah dan integral dari NKRI. Penyalahgunaan *deepfake* ini membuktikan ancaman provokasi yang dapat berpengaruh terhadap masyarakat Papua. Otsus ini secara khusus hadir dan diimplementasikan untuk membantu masyarakat Papua. Ini menjadi polemik yang kompleks dikarenakan berkaitan erat dengan kebijakan nasional Indonesia itu

sendiri. Promosi terhadap otsus melalui kampanye dengan akun palsu ini bisa saja memprovokasi tindakan yang lebih ekstrem dari kelompok-kelompok separatis karena tidak mendukung gerakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Tindakan ini bisa saja berupa penekanan lebih lanjut untuk memisahkan diri dari Indonesia dan memerdekakan Papua dengan aksi pemberontakan di sejumlah wilayah. Dalam kerangka konstruktivisme, identitas negara dan makna kebijakan dibentuk melalui proses intersubjektif yang melibatkan persepsi antaraktor lewat pertukaran simbol, bahasa, dan narasi. Kasus penyalahgunaan *deepfake* ini membuktikan adanya manipulasi terhadap konstruksi makna dan identitas Papua di ranah internasional. Identitas nasional yang telah dibangun secara historis melalui pengakuan kolektif terhadap Papua sebagai wilayah kesatuan, kini disusupi oleh narasi digital yang seakan merepresentasikan suara dari “warga asing.” Ini tentunya dapat mengganggu diskursus otentik. Aktor eksternal dapat mengintervensi nilai-nilai intersubjektif antara masyarakat Papua, negara, serta komunitas internasional.

Melalui akun-akun palsu yang dibentuk dengan bantuan teknologi *deepfake*, kampanye ini merusak nilai transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan nasional yang dinyatakan oleh Indonesia mengenai otsus. Hal ini juga dapat mempengaruhi persepsi palsu dari komunitas internasional, seperti Belanda dan Jerman, yang secara khusus memiliki perhatian terhadap isu Papua. Ketika persepsi palsu ini ditangkap dan dibenarkan secara kolektif oleh mereka, maka identitas Indonesia akan dipertanyakan sebagai negara demokratis dan adil karena nilai universal seperti representasi otentik serta hak menyuarakan pendapat justru dipalsukan dalam kampanye tersebut. Dikarenakan identitas nasional bergantung pada pengakuan kolektif (Wendt, 1999), maka distorsi persepsi global tentang Papua juga secara langsung mengganggu narasi identitas nasional Indonesia. Pada konteks ini, keberhasilan dari manipulasi persepsi tersebut menunjukkan bahwa aktor-aktor domestik tidak lagi berada dalam proses konstruksi tersebut, tetapi terbuka terhadap kemungkinan tindakan sabotase digital secara transnasional.

Identifikasi terhadap akun-akun palsu ini juga tidak dapat diketahui asalnya karena dapat mematikan titik lokasi pada media sosial yang digunakan. Akan tetapi, ada kemungkinan dilakukan oleh pihak asing dengan tujuan menggoyahkan kepercayaan masyarakat. Pihak luar dapat menciptakan “warga palsu” yang berbicara atas nama Papua dan Indonesia. Hal ini tentunya dapat merusak dasar simbolik identitas nasional Indonesia dengan intervensi dari pihak asing. Pada jangka panjang, ini akan berlanjut pada efek kemungkinan terjadinya *democratic backsliding* yang mana respons negara terhadap disinformasi justru menciptakan represi politik (Berenschot, 2021). Ini dapat dipahami dengan kemungkinan terjadinya tidak ada kritik terhadap otsus dikarenakan kekhawatiran untuk dikaitkan dengan propaganda asing. Selain itu, diskursus demokratis mengenai Papua akan hilang arah dari segi integritas maupun substansinya.

Rekaman Audio *Deepfake* Anies dan Surya Paloh

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh tim riset Tirto, rekaman audio percakapan antara Surya dengan Anies diidentifikasi kemungkinannya menggunakan teknologi AI dengan tingkat probabilitas sebesar 98 persen (Akbar, 2024). Hal ini dapat didengar dari suara Surya Paloh yang terkesan robotik dan terbata-bata dalam menanggapi Anies. Kesan pembicaraan yang dibangun di antara mereka juga terdengar santai dan tidak merepresentasikan gaya bicara keduanya selama tampil di depan publik, yakni formal. Rekaman audio ini juga telah dikonfirmasi oleh Partai Nasdem sebagai sebuah informasi hoaks. Mereka memberikan

pernyataan tegas bahwa gaya bicara kedua politisi dalam rekaman tersebut tidak menyerupai mereka yang asli melalui penuturan dan intonasi yang digunakan (Rahmawati, 2024).

Bertepatannya penyebaran disinformasi dengan rekaman audio *deepfake* ini pada masa pemilu membuktikan argumentasi bahwa teknologi AI rentan disalahgunakan untuk mempengaruhi proses pemilu yang sedang berlangsung di Indonesia. Pada hal ini, objektivitas utama yang dapat dilihat secara jelas adalah menjatuhkan kredibilitas Partai NasDem sekaligus Anies sebagai salah satu calon presiden 2024. Penggunaan *deepfake* pada kasus ini dijadikan sebagai alat bukti atau media yang akurat dalam memperkuat narasi bahwa Anies kurang kompeten untuk menjadi seorang presiden yang akan memimpin Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan Anies yang kontroversial dalam rekaman tersebut yang menyebutkan dirinya tidak memiliki integritas sebagai salah satu calon presiden Indonesia. Dalam konteks ini, Anies menyetujui pernyataan kekecewaan Surya Paloh bahwa dirinya banyak melakukan kesalahan selama masa kampanye menuju pemilu 2024.

Dalam menanggapi kasus penyalahgunaan *deepfake* terhadap Anies dan Surya, Kominfo, sebagai pihak yang berwenang, malah tidak mengambil sebuah langkah hukum yang konkret. Padahal, kasus ini menyasar pada pencemaran nama baik kedua politisi tersebut yang tentunya diatur dalam UU ITE pasal 27 ayat 3. Bukannya mengusut tuntas pelaku yang menyebarkan konten manipulasi *deepfake* tersebut, Kominfo hanya meminta setiap media sosial menurunkan konten yang dimaksud agar tidak tersebar secara luas. Selain itu, Kominfo juga hanya melabeli disinformasi tersebut sebagai informasi hoaks agar masyarakat tidak mempercayai narasi yang telah disebarkan (Haryanto, 2024). Langkah yang dilakukan oleh Kominfo ini dapat dinilai kurang efektif karena sangat memungkinkan untuk terciptanya konten disinformasi lainnya melalui *deepfake* yang berpotensi mengacaukan proses demokrasi yang berlangsung.

Untuk memahami hasil analisis terhadap konten *deepfake* Anies dan Surya lebih mendalam, kasus ini akan dikontekstualisasikan dengan kasus penyebaran hoaks yang terjadi pada pemilu 2019. Pada video hoaks yang tersebar, terdapat narasi bahwa server KPU telah memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan total perolehan suara sebesar 57 persen. Narasi ini disampaikan melalui mikrofon oleh seorang laki-laki yang sedang berdiri di tengah-tengah sekumpulan orang seakan-akan berada dalam situasi rapat. Video ini berhasil ditayangkan lebih dari 200.000 kali dan menimbulkan beberapa reaksi negatif dari masyarakat. Padahal, dalam pelaksanaannya, KPU mengedepankan transparansi untuk menunjukkan proses penghitungan suara yang dilakukan secara manual melalui beberapa tahap (*Video yang Sebut Server KPU Menangkan Jokowi 57 Persen*, 2019).

Pada kasus tersebut, objektivitas utamanya adalah menyerang kepercayaan masyarakat terhadap KPU sebagai lembaga resmi yang bertanggungjawab atas proses penghitungan suara dalam pemilu Indonesia. Video hoaks ini juga menyerang salah satu pasangan calon yang dinarasikan secara palsu telah menang dengan cara yang curang. Ini menjadi preseden terhadap kasus Anies dan Surya melalui teknologi *deepfake*. Sekalipun kasus yang terjadi pada tahun 2019 tidak menggunakan manipulasi *deepfake* namun media video yang dijadikan bukti untuk memperkuat narasi disinformasi berhasil dipercayai oleh masyarakat karena mendukung informasi yang disampaikan. Ini menunjukkan bahwa media menjadi produk yang telah disepakati oleh masyarakat sebagai sebuah "fakta." Maksudnya, media ini menjadi bukti empiris yang diyakini masyarakat untuk mendukung informasi yang dianggap sebagai fakta (Leone,

2023). Melalui kasus *deepfake* Anies dan Surya, hasil media yang dimanipulasi teknologi AI tentunya dapat meyakinkan narasi yang disebarkan dengan konten yang cukup realistis.

Hal ini bukanlah tanpa sebab karena kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama yang mewadahi proses demokrasi di Indonesia. Audio *deepfake* yang disebarkan dalam kasus ini tentunya dapat merusak fondasi demokrasi tersebut karena sangat memungkinkan untuk merusak kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, hilangnya kepercayaan masyarakat dapat berakibat pada terhambatnya proses pemilu yang berjalan. Ini dikarenakan persepsi yang telah dibangun dan dimaknai terhadap kandidat politik yang ada sebagai tokoh yang kurang kompeten untuk memimpin suatu negara. Narasi disinformasi yang disebarkan dengan konten manipulasi *deepfake* malah dipakai sebagai alat untuk menyerang setiap kandidat oleh masing-masing pendukung yang akan semakin menurunkan tingkat integritas calon dalam persepsi mereka. Hal demikian akan berakibat pada terhambatnya proses demokrasi yang mendasari identitas nasional Indonesia karena hadirnya rasa skeptis terhadap informasi yang mereka dapatkan.

Video *Deepfake* Jokowi Berpidato dalam Bahasa Mandarin

Dalam video tersebut, Jokowi turut mengenakan pakaian formal berupa jas hitam dan kemeja putih dengan mikrofon di depan dirinya sehingga menampilkan kesan sedang berada di suatu acara penting. Awal mula video ini beredar pada media sosial X dengan narasi awal bahwa Jokowi berpihak ke Cina. Akun lainnya menambahkan narasi melalui video tersebut bahwa Jokowi anti Islam. Narasi-narasi disinformasi yang telah disebarkan dengan video tersebut berhasil dilihat sampai 820.000 kali. Faktanya, video tersebut merupakan hasil manipulasi *deepfake* yang diambil dari video asli Jokowi sedang berpidato dalam acara USINDO pada tahun 2015 dan tidak menggunakan bahasa Mandarin (*Video Jokowi Berbahasa Mandarin Diedit Pakai Deepfake*, 2023).

Konten manipulasi ini membuktikan potensi ancaman berikutnya, yakni berlaku sebagai alat propaganda dengan narasi disinformasi untuk meyakinkan setiap individu maupun sekelompok masyarakat. Ini merupakan bentuk ancaman yang mengkhawatirkan karena dalam narasi konten *deepfake* Jokowi, isu yang dikaitkan berkaitan dengan SARA maupun hubungan diplomasi dengan negara-negara lainnya. Narasi keberpihakan Jokowi terhadap Cina seakan memberikan sebuah “fakta” bahwa Indonesia berada pada kubu Cina. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dengan negara lain seperti AS yang berkonflik dengan Cina (Friedberg, 2011). Maksudnya, hubungan kerja sama luar negeri dengan AS bisa saja memburuk karena AS menilai bahwa Indonesia termasuk dalam kubu “musuh”, yakni Cina dan bisa membatalkan sejumlah perjanjian bilateral. Citra Indonesia sebagai negara yang netral juga dapat terpengaruh karena narasi disinformasi tersebut.

Narasi disinformasi seperti ini juga sebelumnya pernah terjadi pada tahun 2019. Hal ini menyasar pada isu impor tenaga kerja asing Cina sebanyak 10 juta orang. Impor ini dinarasikan akan dilakukan oleh Jokowi sebagai bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Cina dalam hal ketenagakerjaan. Akan tetapi, isu ini telah dibantah oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan data tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tidak sampai menyentuh angka 100.000. Isu hoaks ini juga dinyatakan sebagai isu lama yang sering diangkat kembali dan kemudian diperdebatkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, narasi disinformasi bahwa Jokowi sangat berpihak kepada Cina disebarkan secara luas (Fadhil, 2016; Komdigi, 2019).

Kasus yang terjadi pada paragraf sebelumnya menjadi preseden penting dalam memahami bagaimana narasi palsu yang menyasar identitas etnis maupun negara asing dapat menimbulkan ketegangan horizontal antar kelompok masyarakat. Ini menunjukkan pembentukan persepsi publik yang negatif, menurunkan legitimasi pemimpin, dan potensi terjadinya ketegangan sosial. Hadirnya konten *deepfake* Jokowi hanya semakin meningkatkan potensi terjadinya hal-hal tersebut dengan kekuatan visual dan suara yang menyerupai tokoh asli. Apalagi diperkuat dengan isu hoaks yang pernah terjadi bahwa Jokowi berpihak pada Cina. Narasi yang sama dengan konten yang berbeda tentunya dapat dipercayai oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi digital yang rendah. Narasi pro Cina mengindikasikan ancaman terhadap identitas nasional Indonesia yang dibangun atas dasar kebhinekaan dan prinsip non-blok dalam hubungan luar negeri karena disinformasi yang dibiarkan menyebar secara luas.

Selain itu, narasi Jokowi sebagai tokoh anti Islam tentunya akan mempengaruhi kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam tentunya akan merasa tersinggung dan terkecoh dengan narasi tersebut karena mengancam identitas keyakinan yang mereka percaya. Hal ini dapat berdampak pada kemungkinan terjadinya aksi demo secara massal karena masyarakat tersinggung akibat narasi disinformasi yang disebarkan. Lebih lanjut, masyarakat memungkinkan untuk meminta Jokowi diturunkan sebagai presiden dan memicu terjadinya konflik horizontal yang memecah belah masyarakat Indonesia sehingga mendegradasi identitas nasionalnya yang berasaskan pada Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini dapat kita telaah pada kasus sebelumnya yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di tahun 2017.

Kasus tersebut dapat dijadikan sebagai referensi historis untuk menganalisis *deepfake* Jokowi dengan narasi anti Islam. Ini dikarenakan tujuan utama dalam membangun persepsi bahwa Jokowi telah mengkhianati umat Islam dan akhirnya mengulangi pola delegitimasi seperti yang terjadi dengan Ahok. Hal ini menunjukkan bahwa narasi berbasis agama, apalagi dilengkapi dengan teknologi *deepfake*, memiliki potensi yang besar untuk terjadinya konflik horizontal. Lebih lanjut, sistem demokrasi akan menjadi terhambat dan mendegradasi identitas Indonesia. Dalam konteks demikian, masyarakat menjadi terpecah-belah dan tidak lagi mempercayai prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” sebagai hal yang mendasari identitas demokrasi Indonesia. *Deepfake* tidak hanya berperan sebagai ancaman teknologi, akan tetapi instrumen politis yang dapat menggoyahkan legitimasi negara serta memperparah polarisasi sosial di Indonesia. Maka dari itu, Indonesia perlu menunjukkan kesiapan dalam menanggapi penyalahgunaan teknologi *deepfake* sehingga meminimalisir terjadinya berbagai kemungkinan buruk dari aksi tersebut.

Penanganan terhadap isu *deepfake* Jokowi ini pada faktanya tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari Kominfo. Dalam hal ini, Kominfo hanya memberikan klarifikasi bahwa konten manipulasi tersebut termasuk disinformasi yang dibuat menggunakan teknologi AI. Kominfo hanya memberikan imbauan kepada masyarakat melalui wawancara dengan media massa bahwa mereka harus berhati-hati dalam menerima informasi yang didapatkan (CNN Indonesia, 2023). Akan tetapi, aksi ini tidak cukup untuk menangani kasus penyebaran konten manipulasi hasil *deepfake*. Pada konteks ini, dapat dibuktikan pada penanganan kasus kedua yang malah memunculkan kembali kasus yang sama dengan menargetkan Jokowi seperti yang terjadi dalam penjelasan kasus ketiga ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari ketiga kasus di atas bahwa *deepfake* bukan lagi hanya menjadi sebuah potensi ancaman belaka. Penyalahgunaan teknologi ini sudah terjadi di Indonesia dan sangat memungkinkan untuk terjadi kembali dengan isu yang berbeda walaupun tujuannya tetap sama. Isu penyalahgunaan teknologi di Indonesia lebih menargetkan kepercayaan masyarakat dikarenakan tingkat literasi digital yang rendah sebesar 6,84% dari 278 sekian juta penduduk (*Literasi Digital Indonesia*, 2024). Faktor ini sangat mendukung kerentanan terhadap ancaman penyalahgunaan *deepfake* seperti yang telah dipaparkan pada 3 kasus di atas. Sekalipun efek dari ketiga kasus tersebut tidak menyebar secara luas dan memberikan pengaruh yang cukup signifikan seperti pada kasus-kasus yang terjadi di luar negeri, penyalahgunaan *deepfake* yang telah dilakukan berhasil menunjukkan adanya potensi ancaman lebih lanjut dalam mendegradasi identitas nasional Indonesia. Pada konteks ini, *deepfake* menyerang prasyarat demokrasi substantif di Indonesia, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi yang membangun identitas nasional tersebut.

Bagian penelitian pada bab ini telah menjawab rumusan masalah “bagaimana *deepfake* dapat memunculkan *political* dan *democratic harms* terhadap identitas nasional Indonesia sebagai negara demokrasi dalam isu pemilu?” Dari hasil analisis yang telah dipaparkan, Indonesia sebagai negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi secara substantif telah mengalami berbagai kerentanan selama masa pelaksanaannya. Ini telah ditunjukkan dari setiap masa transisi pemerintahan demokrasi dari era revolusi hingga reformasi. Kerentanan ini banyak difaktori oleh aktor-aktor internal yang memanfaatkan kekuasaan untuk dapat menjalankan kepentingan yang dimiliki. Tentunya hal tersebut dapat semakin diperparah dengan munculnya teknologi *deepfake* yang menimbulkan berbagai potensi ancaman yang baru dan secara spesifik mempengaruhi identitas nasional Indonesia.

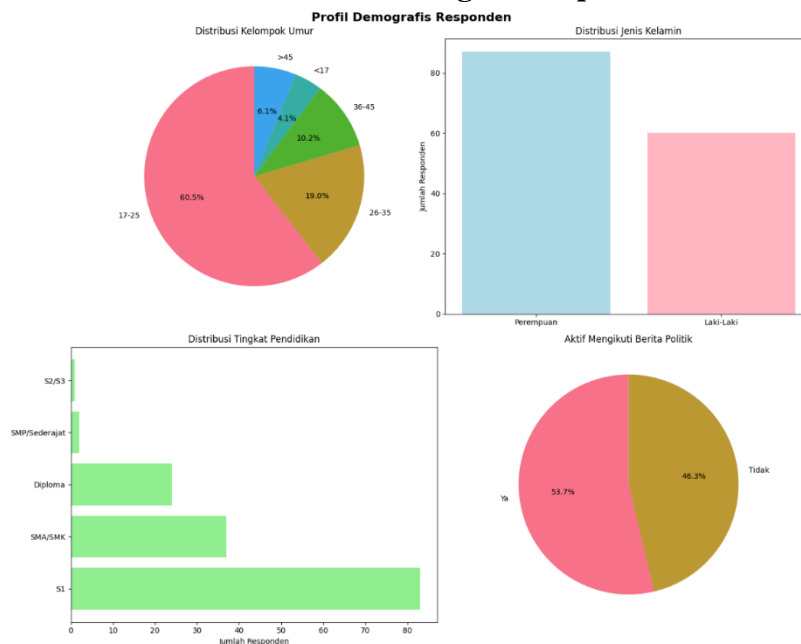
Identifikasi ini diperoleh dengan melihat berbagai kasus internasional yang sudah terjadi dan menargetkan identitas nasional dengan memproyeksikan terhadap situasi di Indonesia. *Deepfake* secara eksplisit menargetkan persepsi dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai fondasi utama demokrasi di Indonesia. Ini dibuktikan dengan dua pemaparan studi kasus *deepfake* yang terjadi dan menargetkan para politisi sebagai representasi politik yang menjamin keberlangsungan sekaligus melindungi identitas yang telah disepakati secara kolektif. Dalam menjamin hal tersebut, nyatanya Indonesia masih memiliki kelemahan terkait regulasi yang telah diimplementasikan dan tidak secara efektif digunakan untuk menangani kasus penyalahgunaan *deepfake* yang telah terjadi. Kehadiran teknologi *deepfake* membuktikan adanya penciptaan realitas sosial yang baru melalui konten manipulatif yang dapat merusak persepsi masyarakat terhadap aktor politik maupun institusi dan akhirnya menghambat proses demokrasi yang berlangsung, seperti aktivitas pemilu. Kerangka konstruktivisme memberikan pemahaman bahwa ancaman terhadap identitas nasional tidak muncul secara alami, melainkan dikonstruksikan yang dalam hal ini melalui penyebaran disinformasi di ruang digital. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan penanganan yang lebih komprehensif terhadap penyalahgunaan *deepfake* sehingga dapat menjamin perlindungan identitas nasionalnya sebagai negara demokrasi.

Hasil Survei Persepsi Publik terhadap *Deepfake* di Indonesia

Dalam memperkuat analisis kualitatif dan studi literatur pada penelitian ini, peneliti turut melakukan survei secara daring terhadap 147 responden. Data responden ini diperoleh melalui pengikut media sosial pribadi, yakni Instagram. Adapun tujuan survei ini dilakukan untuk

mengukur persepsi masyarakat terhadap dampak dari penyalahgunaan *deepfake*. Secara spesifik, survei ini berusaha untuk memperlihatkan kaitan antara *deepfake* dengan demokrasi sebagai hal yang mendasari identitas nasional Indonesia. Aktivitas pemilu menjadi salah satu nilai demokrasi yang hendak dilihat dan dikaji pada survei berikut. Instrumen yang digunakan berupa *Google Form* dengan skala Likert 1(Sangat Tidak Setuju)-4(Sangat Setuju) dan pertanyaan dengan jawaban tertutup untuk demografi serta pengalaman pribadi. Dari 147 responden, didominasi oleh kelompok usia muda dengan data sebesar 60,5% berusia 17-25 tahun dan 19% berusia 26-35 tahun. Mayoritas responden berjenis kelamin Perempuan (58,5%) dan berlatar belakang pendidikan tinggi, yakni lulusan sarjana S1 sebesar lebih dari 50%. Sebagian besar responden mengakui aktif mengikuti berita politik dengan data 53,7%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden mengikuti tren politik terkini dan memiliki keterlibatan terhadap wacana publik. Hal tersebut tentunya termasuk isu manipulasi digital seperti *deepfake*. Karakteristik ini tentunya menjadikan mereka sebagai kelompok strategis dalam demokrasi digital karena dapat menjadi target sekaligus agen yang menyebarkan konten manipulasi hasil teknologi AI.

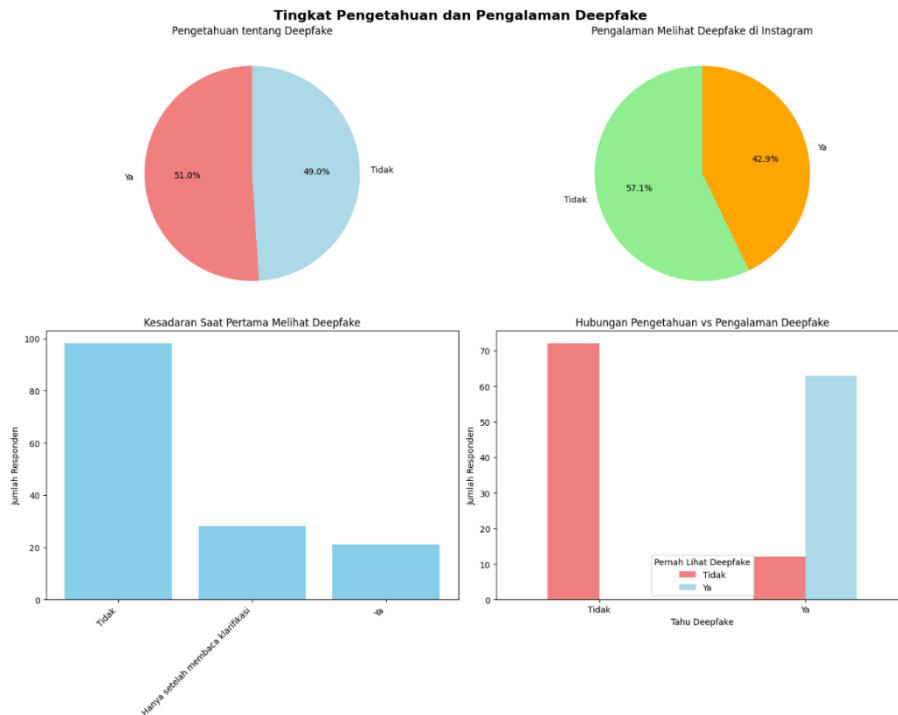
Gambar 2. Demografi Responden Survei



Sumber: Olah Data Penulis

Pengetahuan dan Pengalaman terhadap *Deepfake*

Berdasarkan hasil dari survei, 51% responden menyatakan bahwa mereka telah mengetahui apa itu teknologi *deepfake*. Ini menunjukkan bahwa teknologi *deepfake* bukanlah topik yang asing untuk didengar di kalangan usia muda. Akan tetapi, hanya 42,9% responden yang menyatakan bahwa mereka pernah melihat konten *deepfake*, utamanya melalui media sosial Instagram. Dari data tersebut, sebagian besar responden (66%) tidak menyadari bahwa konten yang mereka lihat adalah hasil dari manipulasi *deepfake*. Ini menggambarkan bahwa ada celah literasi digital yang signifikan sesuai dengan laporan yang ditunjukkan oleh Kominfo. Bahkan pada kalangan usia muda yang memiliki pendidikan tinggi, mereka rentan untuk dimanipulasi melalui konten *deepfake* yang dapat mengubah opini mereka.

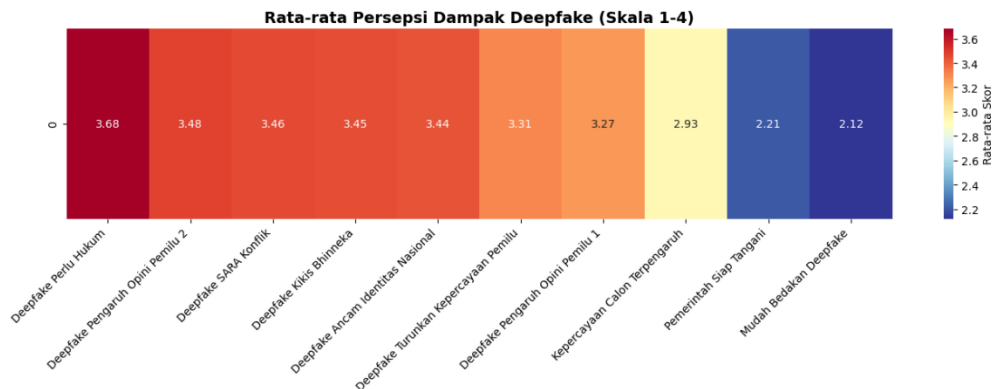
Gambar 3. Tingkat Pengetahuan dan Pengalaman Responden Terkait *Deepfake*

Sumber: Olah Data Penulis

Temuan ini telah menunjukkan bahwa realitas digital (meskipun bersifat manipulatif) telah diterima sebagai realitas sosial yang baru. Dalam konstruktivisme, ini merupakan sebuah realitas yang dibentuk bukan dengan fakta, tetapi melalui simbol serta representasi manipulatif yang dianggap nyata (Guzzini, 2000). Fakta bahwa masyarakat tidak mampu mendeteksi konten palsu menunjukkan adanya krisis pada mekanisme intersubjektif, yakni struktur bersama yang menjadi dasar tindakan kolektif (Adler, 1997). Nilai rendah untuk data “kemampuan membedakan *deepfake*” menandakan lemahnya alat deteksi sosial yang pada akhirnya menggoyahkan intersubjektivitas publik mengenai siapa yang bisa dipercaya. Apabila narasi palsu menjadi lebih dipercaya dibandingkan sebuah kebenaran, maka struktur sosial akan terbangun di atas pondasi yang bersifat manipulatif.

Persepsi Terhadap Dampak *Deepfake*

Survei menggunakan 10 pertanyaan yang diukur dengan skala Likert. Adapun 10 indikator yang diuji memiliki nilai rata-rata di atas 2.0, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap bahwa *deepfake* memiliki dampak yang nyata. Dalam artian, *deepfake* bukan hanya sekadar fenomena teknologi biasa. Hadirnya data ini menunjukkan bahwa asumsi teoritis terkait *deepfake* bukan hanya sebagai tantangan teknis, tetapi juga memiliki risiko yang dapat menggoyahkan pondasi demokrasi dan identitas kebangsaan. Ini utamanya apabila digunakan pada konteks politik elektoral dan isu primordial. Hal demikian berbanding terbalik dengan dua skor terendah yang menunjukka persepsi terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani *deepfake* dan kemampuan masyarakat dalam membedakan konten palsu. Ini mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas kelembagaan serta tingkat literasi digital yang masih kurang dalam menghadapi disinformasi berbasis teknologi kecerdasan buatan seperti *deepfake*.

Gambar 4. Rata-Rata Persepsi Responden Terhadap *Deepfake*

Sumber: Olah Data Penulis

Dalam teori konstruktivisme menurut pandangan Alexander Wendt (1999), identitas dan realitas sosial tidak dibentuk secara objektif, melainkan melalui interaksi simblik, persepsi bersama (intersubjektif), dan konstruksi sosial antaraktor. Pada konteks ini, teknologi *deepfake* berperan sebagai sebuah instrumen yang membentuk atau justru merusak makna sosial dan identitas kolektif sebuah bangsa. Ini dapat dikontekstualisasikan pada hasil survei yang menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat persepsi yang tinggi mengenai ancaman *deepfake* terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan identitas nasional. Hal tersebut menandakan adanya kesadaran masyarakat bahwa manipulasi visual dan suara dapat memicu perubahan makna terhadap “siapa kita sebagai bangsa.” Pada konstruktivisme, ketika persepsi aktor-aktor sosial berubah, maka identitas kolektif negara dapat bergeser (Wendt, 1999). *Deepfake* yang menyasar pada tokoh publik, simbol negara, atau isu sensitif seperti SARA, berpotensi merusak konsensus identitas.

Melalui pemaparan analisis kuantitatif pada bagian atas, dapat ditegaskan bahwa teknologi *deepfake* telah dipersepsikan sebagai sebuah alat yang memiliki potensi daya rusak terhadap konstruksi sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tentunya secara spesifik menyerang pada demokrasi sebagai identitas nasional yang dimiliki. Pada satu sisi, data terkait tingginya skor persepsi publik terhadap potensi manipulasi *deepfake* menunjukkan adanya kesadaran secara kolektif akan ancaman simbolik dan politis dari teknologi tersebut. Ini memperkuat landasan teori bahwa makna kebenaran, identitas, dan kepercayaan publik dibentuk secara sosial dan intersubjektif sehingga sangat rentan diganggu oleh representasi palsu yang disebarkan secara masif serta meyakinkan. Akan tetapi, di sisi lain menunjukkan adanya celah serius dalam sistem demokrasi digital Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap kapasitas negara maupun kemampuan masyarakat sendiri dalam mengenai konten *deepfake*.

Pada perspektif demokrasi substantif, kondisi tersebut menjadi sebuah tanda adanya perlindungan yang kurang terhadap suatu informasi. Dalam jangka panjang, hal ini tentunya dapat mendelegitimasi proses politik serta memperdalam fragmentasi sosial. Oleh karenanya, survei ini tidak hanya menghadirkan data kuantitatif deskriptif, tetapi juga memberikan gambaran yang kritis tentang posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan di tengah era

disinformasi yang berbasis AI. Hasilnya menekankan perlunya intervensi hukum, pendidikan digital, dan strategi komunikasi publik sebagai respons negara yang substantif. Tidak hanya sekadar teknis, tetapi relevan dengan realitas digital yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Deepfake mampu untuk menciptakan narasi provokatif sebagai bentuk disinformasi yang menargetkan masyarakat. Potensi ancaman yang dapat terjadi adalah penggunaan *deepfake* sebagai alat propaganda untuk menyebarkan narasi disinformasi melalui persona sintetis yang dapat dipercaya. Penyalahgunaan teknologi ini juga dapat mempengaruhi salah satu nilai demokrasi yang dianut oleh Indonesia, yakni aktivitas pemilu dengan penciptaan narasi palsu yang menentukan pilihan masyarakat terhadap kandidat tertentu. Ini tentunya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan menghilangkan persepsi yang telah mereka bangun terhadap kandidat tertentu. Penyalahgunaan teknologi ini juga mampu untuk menentukan nasib suatu negara dengan konten-konten yang provokatif dan menargetkan pemimpin negara dengan menunjukkan diri mereka sebagai tokoh yang lemah.

Analisis tersebut dibuktikan dengan beberapa kasus *deepfake* yang telah terjadi di Indonesia dengan melihat implikasi lebih jauh terhadap identitas nasional yang dimiliki. Melalui kerangka pemahaman konstruktivis, *deepfake* mampu mengonstruksikan kembali makna kolektif terhadap suatu hal maupun persepsi yang akhirnya merusak kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama dalam keberlangsungan proses demokrasi di Indonesia. Ini adalah salah satu ancaman yang perlu diwaspadai, apalagi dengan masih lemahnya regulasi yang berjalan dan belum secara spesifik membahas mengenai etika penggunaan AI. Tidak hanya itu, data primer dari hasil survey terhadap 147 responden juga semakin menguatkan argumen penelitian bahwa ada potensi ancaman yang begitu besar dari penyalahgunaan *deepfake* yang dapat mendegradasi identitas nasional Indonesia dengan menyerang elemen-elemen demokrasi yang berjalan, salah satunya adalah pemilu. Ini ditunjukkan dengan respons masyarakat yang sebagian besar menyatakan bahwa *deepfake* sangat mempengaruhi persepsi mereka terhadap tokoh politik maupun institusi pemerintahan. Padahal, kepercayaan inilah yang sangat menentukan keberlangsungan proses demokrasi tersebut.

Penelitian ini telah mengkaji ancaman bahaya *deepfake* yang muncul secara politik dan demokrasi terhadap identitas nasional Indonesia melalui analisis teori konstruktivisme dan penggunaan konsep *Liar's Dividend*. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang dapat dijadikan pijakan untuk penelitian lanjutan berupa analisis komparatif lebih mendalam terkait dengan kebijakan luar negeri negara-negara lain yang telah berhasil merespons ancaman *deepfake* secara sistemik. Penelitian lanjutan tersebut dapat memperkaya pemahaman yang lebih baik dalam melindungi identitas digital dan demokrasi pada suatu negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, khususnya Program Studi Hubungan Internasional, atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas arahan, masukan, dan bimbingan yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Adler, E. (1997). Seizing the middle ground: Constructivism in world politics. *European Journal of International Relations*, 3(3), 319–363. <https://doi.org/10.1177/1354066197003003003>
- Akbar, A. (2024, January 26). *Ada rekaman Surya Paloh memarahi Anies, bagaimana faktanya?* Tirto. <https://tirto.id/ada-rekaman-surya-paloh-memarahi-anies-bagaimana-faktanya-gUW9>
- Barnett, M. (2020). Social constructivism. In J. Baylis, S. Smith, & P. Owens (Eds.), *The globalization of world politics: An introduction to international relations* (8th ed., pp. 153–170). Oxford University Press.
- Bensinger, K. (2024, July 27). *Elon Musk shares manipulated Harris video, in seeming violation of X's policies*. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2024/07/27/us/politics/elon-musk-kamala-harris-deepfake.html>
- Berenschot, W. (2021). Democratic backsliding in Indonesia: A structural interpretation. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(2), 139–157.
- Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). *Deepfakes and the new disinformation war*. *Foreign Affairs*, 98(1), 147–155.
- CNN Indonesia. (2023, October 26). *Kominfo bongkar cara produksi video deepfake Jokowi berbahasa Mandarin*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231026182710-192-1016431/kominfo-bongkar-cara-produksi-video-deepfake-jokowi-berbahasa-mandarin>
- Das, M. V. (2023, December 6). *Study: AI-powered deepfakes see 1530% increased usage in APAC. Marketing Interactive*. <https://www.marketing-interactive.com/ai-powered-deepfakes-increased-usage-apac>
- Fadhil, H. (2016, December 20). *Pemerintah tepis isu 10 juta tenaga kerja China masuk Indonesia*. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-3376443/pemerintah-tepis-isu-10-juta-tenaga-kerja-china-masuk-indonesia>
- Gambín, Á. F., Yazidi, A., Vasilakos, A. V., Haugerud, H., & Djenouri, Y. (2024). *Deepfakes: Current and future trends*. *Artificial Intelligence Review*, 57(3), Article 68. <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10679-x>
- Goode, J. P., & Stroup, D. R. (2015). Everyday nationalism: Constructivism for the masses. *Social Science Quarterly*, 96(3), 717–739. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12188>
- Graham, R., & Smith, G. J. D. (2024). *Cybercrime and digital deviance* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003283256>
- Guzzini, S. (2000). A reconstruction of constructivism in international relations. *European Journal of International Relations*, 6(2), 147–182. <https://doi.org/10.1177/1354066100006002001>
- Hafiz, M. (2024). The era of artificial intelligence: Examining Indonesia's adaptability and legal challenges. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 3(3). <https://doi.org/10.31014/aior.1996.03.03.128>
- Haryanto, A. T. (2024, January 23). *Viral narasi Surya Paloh marah ke Anies, ini kata Kominfo*. *detikINET*. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7156193/viral-narasi-surya-paloh-marah-ke-anies-ini-kata-kominfo>
- Hendrawan, D., Andersen, C., Tiopan, D., Kurniawan, S., & Malinda, M. (2023). Juridical review of copyright infringement in the use of *deepfakes* in the creative industry in Indonesia. *International Journal of Cyber Criminology*, 17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4766613>
- Hopf, T. (1998). The promise of constructivism in international relations theory. *International Security*, 23(1), 171–200.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2024). *Literasi digital Indonesia*. <https://data.komdigi.go.id/article/literasi-digital-indonesia>

- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019, June 6). *[HOAKS] Presiden Jokowi akan impor 10 juta warga China*. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/hoaks-presiden-jokowi-akan-impor-10-juta-warga-china>
- Khapra, P. (2022). Evolution of cybercrime and *deepfakes*: Exploring intervention strategies of international organizations against AI threats. *NeuroQuantology*, 20(22), 1415–1425.
- Kompas.com. (2019, April 5). *[Klarifikasi] Video yang sebut server KPU menangkan Jokowi 57 persen*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/05/14423501/klarifikasi-video-yang-sebut-server-kpu-menangkan-jokowi-57-persen?page=all#page2>
- Leone, M. (2023). The spiral of digital falsehood in *deepfakes*. *International Journal for the Semiotics of Law*, 36(2), 385–405. <https://doi.org/10.1007/s11196-023-09970-5>
- Onuf, N. G. (2013). *Making sense, making worlds: Constructivism in social theory and international relations*. Routledge.
- Rahman, A. (2022). *Metode penelitian ilmu sosial*. Widina Bhakti Persada.
- Rahmawati, D. (2024, January 23). *Viral suara hoax dirinya dan Paloh, Anies: AI bisa bikin seperti asli*. *detikNews*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7156245/viral-suara-hoax-dirinya-dan-paloh-anies-ai-bisa-bikin-seperti-asli>
- Riyanto, G. P., & Nistanto, R. K. (2023, December 22). *Kominfo terbitkan SE yang atur etika penggunaan AI*. *Kompas Tekno*. <https://tekno.kompas.com/read/2023/12/22/15520497/kominfo-terbitkan-se-yang-atu-etika-penggunaan-ai>
- Rosyidin, M. (2022). *Teori hubungan internasional: Dari perspektif klasik sampai non-Barat* (2nd ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Sitompul, J. (2018, October 12). *Landasan hukum penanganan cybercrime di Indonesia*. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia-cl5960/>
- Sumsub. (2024, November 21). *APAC sees 121% increase in identity fraud, with deepfakes becoming a growing threat*. PR Newswire. <https://www.prnewswire.com/apac/news-releases/sumsub-apac-sees-121-increase-in-identity-fraud-with-deepfakes-becoming-a-growing-threat-302312092.html>
- Tenbarge, K. (2024, August 1). *Kamala Harris deepfake shared by Musk sparks free speech debate*. *NBC News*. <https://www.nbcnews.com/tech/misinformation/kamala-harris-deepfake-shared-musk-sparks-free-speech-debate-rcna164119>
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). *Deepfakes* and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. *Social Media + Society*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2056305120903408>
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.
- Wijaya, C. (2020, December 1). *Papua: Mengapa ratusan akun “palsu” berbahasa Belanda muncul mendukung otsus di tengah penolakan sejumlah warga?* *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55053656>